

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai ukuran keberhasilan yang disepakati dalam mengukur tingkat pencapaian Visi Misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatannya. Dimana capaian kinerja tersebut merupakan hasil komulatif dan akumulasi pencapaian kinerja *outcome* dari setiap program pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan demikian, capaian kinerja pada akhir periode RPJMD dapat menggambarkan tingkat keberhasilannya.

Di samping itu, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan evaluasi tingkat pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja ini menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci, yang dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap akhir tahun perencanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi, guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Secara teknis, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, dapat fokus dikelompokkan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat sasaran (dampak/impact) pemerintah daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2). Aspek Pelayanan Umum; dan 3). Aspek Daya Saing Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019**

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian 2017	Target 2019
<b>A.</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>			
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	Persen	5,12	4,7 – 5,0
2	PDRB Per kapita	Rp. (juta)	23,42	24
3	Laju Inflasi	Persen	3,72	< 4
4	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	67,72	> 68
	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,91	73,1
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,94	12,1
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,87	7,1
	d. Pengeluaran Per Kapita	Rp. (ribu)	9.340	9.700
5	Angka Kemiskinan	Persen	18,80	17-18
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,33	5,0 – 5,3
7	Indeks Pembangunan Gender	Angka	63,43*	> 65
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,02	< 1
<b>B.</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>			
1	Lama Waktu Perijinan Investasi	hari	5,2	4,8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	78,51	79,5
3	Angka Kriminalitas	kasus	330	310
<b>C.</b>	<b>Aspek Layanan Umum</b>			
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>			
	APK SD/ sederajat	Angka	109,91	110
	APK SMP/ sederajat	Angka	102,36	100
	APM SD/ sederajat	Angka	95,34	91
	APM SMP/ sederajat	Angka	73,73	70
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>			
	Angka Kematian Ibu	Per 100 rb KH	76,80	61
	Angka Kematian Bayi	Per seribu KH	8,03	6
	Prevalensi Balita gizi buruk	Persen	2,69	0,1

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian 2017	Target 2019
<b>3</b>	<b>Urusan PUPR</b>			
	Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,07	79,60
	Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	95,57	94,25
	Lajur Jalan Minimal 5,5 M	Persen	18,33	19,13
	Bangunan Pengairan Kondisi Baik	Persen	42,20	45,2
	Ketersediaan Air Baku Irigasi	Persen	79,99	90
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persen	22	22
	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	83,28	100
	Cakupan Pelayanan Limbah Perkotaan	Persen	84,35	100
	Cakupan Timbulan Sampah Terlayani	Persen	55,5	64
<b>4</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	91,93	92,1
	Cakupan Kepemilikan Rumah	Persen	81,96	86,1
	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	Hektar	13,88	10,8
	Persentase Drainase Perkotaan	Persen	20,20	24,19
<b>5</b>	<b>Urusan Trantibum dan Linmas</b>			
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Persen	-	70
	Tingkat Penanganan Pelanggaran K3	Persen	100	100
	Cakupan Pelayanan Korban Bencana	Persen	100	100
	Tingkat Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	31	50
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>			
	Cakupan PMKS Yang Terlayani	Persen	68,56	70
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>			
	Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	Persen	93,46	94
<b>2</b>	<b>Urusan PP dan PA</b>			
	Cakupan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	Persen	100	100
<b>3</b>	<b>Urusan Pangan</b>			
	Pola Pangan Harapan	Skor	95	95,45
<b>4</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	43,6	65,5
<b>5</b>	<b>Urusan Adminduk Capil</b>			
	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	86,78	93

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian 2017	Target 2019
<b>6</b>	<b>Urusan PMD</b>			
	Cakupan Desa dengan BUMDes Sehat	Persen	80	84
<b>7</b>	<b>Urusan Dalduk dan KB</b>			
	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	78,09	92
	Cakupan PUS Tak Terlayani	Persen	10,3	10
	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	56,73	79
<b>8</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>			
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	556	420
<b>9</b>	<b>Urusan Komunikasi &amp; Informatika</b>			
	Cakupan SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	Persen	32	37
<b>10</b>	<b>Urusan KUKM</b>			
	Cakupan Koperasi Sehat	Persen	62	71
	Usaha mikro bersertifikat / berijin	Unit	1.194	1.200
<b>11</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>			
	Pertambahan nilai investasi baru	Rp. (juta)	547.461	570.000
<b>12</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>			
	Jumlah peraih prestasi olahraga tingkat regional dan nasional	Orang	66	75
<b>13</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>			
	Jumlah pementasan seni budaya daerah	Kali	69	72
	Jumlah Gedung Pementasan Kesenian	Unit	11	11
<b>14</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>			
	Cakupan Perpustakaan Desa	Persen	32,22	50
	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>			
	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Rp. (miliar)	121.52*	133.3
	Produksi ikan konsumsi	Ton	6.303	6.500
<b>2</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>			
	Angka kunjungan wisata	orang	2.262.738	2.779.000
<b>3</b>	<b>Urusan Pertanian</b>			
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. (triliun)	5,6	6,2
	Produksi Padi	Ton	237.887	259.830
	Produksi Jagung	Ton	52.150	53.936
	Produksi kedele	Ton	126,2	230
	Produksi daging	Ton	13.721	14.929

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian 2017	Target 2019
<b>4</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>			
	Jumlah Pasar ber-SNI	unit	0	1
<b>5</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>			
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. (triliun)	5,25	6,0
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
	Opini Audit BPK	opini	WTP	WTP